

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Haris Farid. Yahman dan Mujiati. 2016. *Problematika Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Jawa Barat*. Yogyakarta: STPN Press dan PPPM.
- Asih Retno Dewi. 2016. *Penyelesaian Problem Agraria Asas Keterbukaan Dalam Pengadaan Tanah. Efektifitas Larasita. Pemberdayaan Petani. Konsep Ruang Tanah Adat. Dan Deformasi*. Yogyakarta: STPN Press.
- Bernhard Limbong. 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Regulasi. Kompensasi Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Margareta.
- Boedi Harsono. 1997. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang–Undang Pokok Agraria. Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. ed.rev. Cet. XII. Jakarta: Djambatan.
- C.S.T. Kansil. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Nama dan Realita*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Firmanto Laksana. 2024. *Akselerasi Pencegahan Konflik Agraria Untuk Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara*. Karya Ilmiah Lemhanas RI.
- H. Aminuddin Salle. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Hasan Wargakusumah. 2001. *Hukum Agraria 1*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- I Wayan Suandra. 1994. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1996. *Masalah Hak Atas Tanah. Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Bandung: PT. Citra Adtya Bakti.

- Imam Koeswahyono. 2008. *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- John Salindeho. 1972. *Masalah Tanah Dan Pembangunan Karya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.A. Moegini Djodjodirdjo. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Maria S. W. Sumardjono. 2009. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Mariam Darus Badruzaman. 2000. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Mudakir. 1983. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sarjita. 2005. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Tugu Jogja.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Cet. IV. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- _____. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soejono dan H. Abdurrahman. 1998. *Prosedur Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soetandyo Wignjosoebroto. 1991. *Hukum Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Pers.

Sutaryono. dkk. 2021. *Problematika Pengelolaan Pertanahan di Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.

W. J. S. Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

C. Tesis

Amgasussari Anugrahni Sangalang. 2012. *Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum. Perlindungan Hukum. Dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006*. Tesis. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rika Fitriani. 2018. *Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum UUPA (Studi Kasus Pembuatan Tol Sumatera di Wilayah*

Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan). Tesis. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

D. Jurnal

Andi Abrianawaty. Baso Madiung dan Yulia A. Hasan. 2022. *Analisis Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Rel Kereta Api Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*. Volume 5 Nomor 1. Indonesia Journal of Legality of Law.

Eny Susilowati. 2020. *Pelepasan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Palangka Raya*. Volume 2 Nomor 2. Jurnal Sociopolitico.

Iga Gangga Santi Dewi. 2017. *Konflik Tentang Ganti Rugi Non Fisik Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Volume 46 Nomor 3. Masalah - Masalah Hukum.

Rahayu Subekti. 2016. *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Volume 5 Nomor 2. Yustisia.

Shelvi Manurung. Rofiq Laksamana dan Priyo Katon Prasetyo. 2019. *Problematisasi Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian Legundi Bunder Di Kabupaten Gresik*. Volume 2 Nomor 1. Jurnal Tunas Agraria.

Ujang Bahar. 2008. *Permasalahan Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Volume 38 Nomor 1. Jurnal Hukum Dan Pembangunan.

E. Website

JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman Dan Investasi. "*Pemberian Ganti Kerugian Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah*". <https://jdih.maritim.go.id/infografis> Artikel. Edisi 12 Februari 2024.

Kompasiana. "*Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*". <https://www.kompasiana.com/herybekasi/582e7e6623afbdbc048b4569/pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum>. Artikel Edisi 15 Maret 2019.

Mizan. "*Hukum adalah suatu peraturan norma*". <http://em-mizan.blogspot.co.id/2009/11/hukum-adalahsuatu-peraturan-norma.html>. Artikel Edisi 15 Maret 2019.

F. Wawancara

Abbas Lahamid, S.H., Panitera di Pengadilan Negeri Barru, wawancara pada hari/tanggal, Selasa, 21 Januari 2025, pukul 09.30 WITA.

Imelda, S.H., Hakim di Pengadilan Negeri Barru, wawancara pada hari/tanggal, Selasa, 21 Januari 2025, pukul 10.30 WITA.

La Minu Kalibu, Warga Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru, wawancara pada hari/tanggal, Selasa, 14 Januari 2025, pukul 13.25.

Neneng Hasni, S.P., Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Barru, wawancara pada hari/tanggal, Senin, 13 Januari 2025, pukul 10.20 WITA.